

Pengertian, Konsep, Teori dan Lingkup Sistem dan Kebijakan Pendidikan Nasional

Lidya Fitri¹, Fitriana Suanti², Ridwal Trisoni³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

lidyafitri15@gmail.com, fitrinasusanti1978@gmail.com,

ridwaltrisoni@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

The development of knowledge and technology greatly influences changes in educational goals every year. Education for humans is very important so the need for quality education is the main goal for creating human resources that are able to increase personal potential. The importance of national systems and policies cannot be underestimated. They have a direct impact on the quality of education received by the younger generation, social mobility, and the country's economic development. Therefore, the government and related stakeholders need to be actively involved in formulating effective policies, monitoring their implementation, and committing to continue improving the national education system for a bright future. This research aims to explain the meaning, concepts, theories and scope of the national education system and policies. The research method used is the library research method, which is a method that uses a library study approach by examining sources or references that are relevant to research problems to find answers to research problems. The research results show that it is important to develop a strong national education policy system to create an educated and competent society, which is ready to face the challenges of the times.

Keywords: System, National Education Policy

ABSTRACT

Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi terjadinya perubahan dari tujuan pendidikan setiap tahunnya. Pendidikan bagi manusia sangatlah penting sehingga kebutuhan akan pendidikan bermutu adalah tujuan utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan potensi diri. Pentingnya system dan kebijakan nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka memiliki dampak langsung pada kualitas Pendidikan yang diterima oleh generasi muda, mobilitas sosial, dan perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu secara aktif terlibat dalam merumuskan kebijakan yang efektif, memantau implementasinya, dan berkomitmen untuk terus memperbaiki system Pendidikan nasional demi masa depan yang cerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, konsep, teori dan lingkup system dan kebijakan pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan ialah metode Library research, yaitu metode yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah sumber atau referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk mencari jawaban permasalahan penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa penting untuk Pengembangan sistem kebijakan Pendidikan nasional yang kokoh adalah untuk menciptakan Masyarakat yang terdidik dan kompeten, yang siap menghadapi tantangan zaman.

Kata Kunci: Sistem, Kebijakan Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional mengungkapkan tiga tantangan besar dalam bidang Pendidikan di Indonesia yaitu 1) mempertahankan hasil-hasil Pembangunan yang telah tercapai, 2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global, dan 3) pelaksanaan ekonomi daerah yang berorientasi pada terwujudnya Pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi Masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh bagaimana proses Pendidikan yang dilaluinya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hasil dari proses pendidikan. Bahkan, kemajuan peradaban dan kemakmuran suatu bangsa dapat diukur dari sumber daya manusianya bukan dari sumber daya alam negara tersebut. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan guna kesejahteraan warganya. Maka wajar jika komponen peningkatan sumber daya manusia itu menjadi fokus utama dalam Pembangunan sebuah bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Berbagai kebijakan baik itu dari pemerintah ataupun dari satuan Pendidikan dikeluarkan guna perbaikan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi sehingga tujuan Pendidikan nasional dapat terwujud.

Pendidikan merupakan proses terus-menerus dan tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama negara. Selain itu Pendidikan juga merupakan Upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesadaran setiap individu. Pendidikan pada umumnya identik dengan sekolah atau madrasah. Oleh karena itu Pendidikan adalah tonggak penting dalam Pembangunan suatu bangsa, dan sistem serta kebijakan pendidikan nasional menjadi fondasi yang sangat krusial dalam upaya memastikan bahwa Pendidikan berjalan efektif, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah negara. Sistem Pendidikan nasional mencakup struktur dan organisasi Pendidikan, sementara kebijakan Pendidikan nasional adalah seperangkat Langkah-langkah dan regulasi yang mengatur jalannya Pendidikan di tingkat nasional. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana Pendidikan beroperasi pendanaan, kualifikasi guru, evaluasi Pendidikan, serta Upaya untuk menciptakan akses Pendidikan yang setara bagi semua warga negara. Kebijakan Pendidikan nasional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan memajukan nilai-nilai Pendidikan yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat.

Dewasa ini sistem pendidikan semakin berkembang pesat. Segala sesuatu yang dapat mengembangkan sistem pendidikan diterapkan guna mencapai tujuan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab.

Kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan Pendidikan (Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, 2021). Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan factor-faktor yang saling berhubungan diantaranya faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan Pendidikan, faktor alat Pendidikan dan faktor lingkungan. Maka dapat di simpulkan bahwa Pendidikan merupakan sebuah system yang saling berkaitan antar subsistem. Sistem tidak akan berjalan apabila salah satu sub system bermasalah yang akan mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi sub system tersebut dalam mencapai tujuan Pendidikan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Pendidikan yang akan dilaksanakan harus direncanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perumusannya, analisis, implementasi, monitoring/ pemantauan serta evaluasi seputar masalah Pendidikan yang akan diterapkan agar dapat menjawab tantangan Pendidikan dapat diberlakukan dan diperbarui secara periodic. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan Pendidikan dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan dalam menentukan program Pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan Masyarakat dan pemerintah demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (Studi Kepustakaan), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan kajian terhadap referensi atau literatur yang relevan. Metode penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh informasi melalui penelusuran teori, konsep dan kajian literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan tentang pengertian, konsep, teori dan lingkup system dan kebijakan Pendidikan nasional. Sumber data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah artikel yang terkait tentang system dan kebijakan Pendidikan nasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi pertanyaan penelitian, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan dengan menggunakan analisis teori dan sumber data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Sistem dan Kebijakan Pendidikan Nasional

Kebijakan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Pendidikan akan selalu ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau pemerintah (Saharuddin, n.d.). Berbicara mengenai kebijakan Pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang mana diharapkan dapat diterapkan di setiap sekolah yang ada (Farkhan et al., 2022). Kebijakan Pendidikan dibuat dengan menyesuaikan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang tertera di Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional (Fadiyah Elwijaya, 2021).

Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesimbangan. Pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. System Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Kebijakan Pendidikan diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan sistem Pendidikan nasional tersebut.

Dari tujuan Pendidikan nasional tersebut paling tidak dapat dilihat bahwa ada beberapa komponen penting yang melandasi Pembangunan Pendidikan nasional di Indonesia yang mengarah pada peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dengan kriteria umum sebagai berikut (Sudiyono, 2008):

- 1) Manusia yang bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, Kesehatan jasmani dan Rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri
- 3) Aspek kewarganegaraan yang tinggi.

Ketiga aspek di atas merupakan domain utama yang harus dicapai oleh Pendidikan nasional, yang memberikan sumbangan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan nasional harus mampu untuk membangun dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk kebutuhan Pembangunan kebudayaan,

Kebijakan merupakan aktivitas publik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun intansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Setiap aspek kehidupan terdapat

kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan.

Menurut (Sukarman Purba, 2021), Kebijakan Pendidikan terdiri dari dua kata yaitu kebijakan (policy) dan Pendidikan (educator). Kebijakan diartikan kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia, kunci Pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian serta stabilitas suatu negeri.

Kebijakan merupakan suatu aktifitas formal yang diselenggarakan oleh Lembaga (pemerintah) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Masyarakat dan berlaku umum (Nasaruddin, 2016). Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, Lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2017). Kebijakan Pendidikan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan public yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam Pendidikan.

Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut (Rozak, 2021):

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

Pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran Pendidikan secara berarti.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga Pendidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa Lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan system Pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diverifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis Pendidikan secara professional.
4. Memberdayakan Lembaga Pendidikan baik sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan Masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan system Pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan baik oleh Masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan system Pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai Upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sistem Pendidikan nasional mencerminkan struktur dan organisasi yang memungkinkan penyaluran pengetahuan dan keterampilan kepada warga negara. Ini mencakup jenjang Pendidikan mulai dari Pendidikan dasar hingga tinggi, serta berbagai Lembaga Pendidikan, guru, kurikulum, dan metode pengajaran yang digunakan. Dengan kata lain, system Pendidikan nasional adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana Pendidikan diselenggarakan di suatu negara, yang diharapkan akan menghasilkan individu yang terdidik, berwawasan luas dan mampu berkontribusi pada Pembangunan Masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan Pendidikan nasional adalah instrument pemerintah dalam mengendalikan dan mengarahkan perkembangan system Pendidikan. Kebijakan Pendidikan mengatur berbagai aspek, termasuk kurikulum, standar Pendidikan, pendanaan, kualifikasi guru, evaluasi Pendidikan serta Upaya untuk

menciptakan akses Pendidikan yang setara bagi semua warga negara. Kebijakan Pendidikan nasional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa yang berkualitas, dan memajukan nilai-nilai Pendidikan yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep sistem dan kebijakan Pendidikan nasional, kita dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi permasalahan Pendidikan, merancang solusi yang tepat, serta berkontribusi pada Upaya meningkatkan mutu Pendidikan di suatu negara. Oleh karena itu, pengetahuan tentang konsep-konsep ini menjadi landasan yang penting dalam Upaya menacapai tujuan Pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan Masyarakat.

Teori dan Lingkup Sistem dan Kebijakan Pendidikan Nasional

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara untuk itu setiap warga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik atau pun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan Pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Hal ini menuntut adanya sistem Pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Sistem Pendidikan seperti itu tidak mungkin di penuhi tanpa adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan, yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global.

Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana yang dikutip oleh Nanang Fatah, teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang saling berhubungan yang secara sistematis menggambarkan dan menjelaskan keteraturan perilaku dalam organisasi Pendidikan (Fattah, 2013).

Teori dan lingkup sistem kebijakan Pendidikan nasional adalah elemen-elemen kunci dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan di tingkat nasional. Pendidikan bukan hanya sekedar proses penyampaian pengetahuan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai visi, dan arah yang ingin dikejar oleh sebuah negara dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kerangka ini, pemahaman tentang teori-teori pendidikan dan cakupan kebijakan Pendidikan nasional menjadi penting untuk memandu upaya-upaya pembangunan pendidikan yang efektif.

Teori-teori Pendidikan memberikan dasar konseptual dalam merancang Pendidikan yang relevan dan efisien. Berbagai teori seperti teori konstruktivisme, teori humanisme, dan teori psikologi perkembangan, menciptakan landasan bagi pengembangan kurikulum, metode pengajaran, serta strategi Pendidikan yang

mendukung perkembangan peserta didik. Selain itu, teori-teori ini juga membantu dalam memahami bagaimana individu belajar, berinteraksi dengan lingkungan, dan berkembang menjadi warga negara yang berkompeten dan berdaya saing.

Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Landasan kebijakan dalam Pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana Pendidikan di dalam menjalankan kegiatan Pendidikan. Oleh karena itu landasan tersebut biasanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada suatu negara, kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan Masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa kebijakan Pendidikan nasional sangat penting perannya di dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan Pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Kebijakan Pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan public. Pemahaman ini dimulaid ari ciri-ciri kebijakan public secara umum, antara lain: a) kebijakan public adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan Lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. b) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, dan bukan mengatur orang seorang atau golongan.

Menurut (Subarsono, 2013), Kebijakan Pendidikan memiliki karakteristik yang khusus diantaranya :

1. Memiliki tujuan Pendidikan. Kebijakan Pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan Pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada Pendidikan.
2. Memnuhi aspek legal-formal. Kebijakan Pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang dipenuhi agar kebijakan Pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusi sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan Pendidikan yang legitimasi.
3. Memiliki konsep operasional. Kebijakan Pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan Pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan Pendidikan adalah fungsi pendukung pengambil

keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan Pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli dibidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada Pendidikan dan lingkungan di luar Pendidikan. Para administrator Pendidikan, pengelola Lembaga Pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan Pendidikan adalah unsur-unsur minimal pembuat kebijakan Pendidikan.
5. Dapat dievaluasi. Kebijakan Pendidikan itupun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi.
6. Memiliki sistematika. Kebijakan Pendidikan tentunya merupakan sebuah system juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya.

Disisi lain, lingkup kebijakan Pendidikan nasional mencakup berbagai aspek penting, termasuk kurikulum pendanaan Pendidikan, pengembangan guru, evaluasi Pendidikan, serta aspek-aspek lain yang berpengaruh pada penyelenggaraan Pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan Pendidikan nasional membentuk arah dan prioritas Pendidikan, menentukan standar kualitas, serta mengatur cara mengukur pencapaian dalam dunia Pendidikan.

Lingkup sistem dan kebijakan Pendidikan nasional melibatkan banyak aspek, termasuk kurikulum, pendanaan, pengembangan guru, evaluasi Pendidikan, akses yang setara, penelitian Pendidikan, dan kebijakan Pendidikan khusus. Semua aspek ini harus diintegrasikan secara holistic untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional yang efektif.

Pentingnya pemahaman tentang teori-teori Pendidikan dan pemahaman mendalam tentang lingkup kebijakan Pendidikan nasional adalah agar kita dapat mengembangkan sistem Pendidikan yang berkelanjutan dan efektif. Dengan dasar pengetahuan ini, pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama merancang, menerapkan, dan mengukur dampak kebijakan Pendidikan yang memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang teori dan lingkup sistem dan kebijakan Pendidikan nasional sangat penting untuk memandu transformasi Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendidikan mengalami perubahan di berbagai sisi karena adanya perbaikan dari berbagai hal yang berkaitan dengan Pendidikan, terutama kebijakan strategis seputar Pendidikan. Kebijakan Pendidikan merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial,

ekonomi, dan budaya Masyarakat. Kebijakan Pendidikan merupakan Pengembangan sistem kebijakan Pendidikan nasional yang kokoh adalah untuk menciptakan Masyarakat yang terdidik dan kompeten, yang siap menghadapi tantangan zaman. Upaya yang dilakukan untuk perbaikan dalam konsep Pendidikan, peraturan-peraturan dan pelaksanaan Pendidikan serta menghilangkan praktik Pendidikan masa lalu yang tidak sesuai sehingga adanya perubahan aspek Pendidikan di masa yang akan datang. Untuk itu kebijakan Pendidikan diperlukan guna mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Kebijakan Pendidikan bertujuan untuk mengatur penyelenggara Pendidikan menuju kondisi yang lebih baik, sehingga menjadi penting untuk dikaji mulai dari pengertian dan konsep kebijakan, karakteristik serta teori dan lingkup kebijakan Pendidikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, N. G. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 67–71. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Fadiyah Elwijaya, V. M. dan N. G. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Fattah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasaruddin. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 139–154.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511–518.
- Rozak, A. (2021). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. 3(2), 6.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik* (P. Pelajar (ed.)).
- Sudiyono, S. (2008). Perspektif Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.18860/el.v5i1.5148>
- Sukarman Purba, D. (2021). Analisis Sistem Kebijakan Pendidikan. *Yayasan Kita Menulis*.